



OPINI

Serba Gibran

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.29 WIB



Oleh: Prof. Muhammad Chirzin((Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta))
EJAK Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan tentang status Ijazah Gibran, 6 Oktober 2026 malam, laman medsos dan grup-grup WA berjejal info sepu-
tar Ijazah Gibran.
Bahwa MK dengan sangat meyakinkan menyatakan tidak menemukan Ijazah SMA atau

yang setara milik Gibran bukan berarti MK mendiskualifikasi ke-
Wakil Presiden-an Gibran, karena Gugatan Denny Indrayana dan 12
pihak pelapor lainnya adalah tentang kepemilikan Ijazah Gibran
sebagai syarat pendaftaran Calon Wakil Presiden.
MK menyatakan bahwa Denny Indrayana dan para pelapor tidak
punya legal standing untuk mela-
porkan kasus tersebut.

Sementara itu beredar info bahwa pada saat menjelang pem-
bacaan Putusan MK tersebut Jokowi mengunjungi Prabowo di kediamannya.
Beredar spekulasi penilaian, bahwa, jika sejak awal MK telah berpendapat Denny Indrayana dkk tidak memenuhi syarat untuk membawa perkara ini ke MK, mestinya MK tidak menyidang-
kannya, hingga menghadirkan

saksi dari Singapura dan Australia segala. Orang lalu menilai MK telah main dua kaki.
Ini putusan yang agak tidak biasa, jadi wajar banyak spekulasi. Duduk perkaranya berdasarkan putusan resmi MKRI No 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 ...

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ISLAM	9
Aneka Berita	11

TEKNOLOGI
Cara Menonton Video TeraBox Langsung di Browser Tanpa Aplikasi



BANDA ACEH - TeraBox banyak dipakai untuk menyimpan dan membagikan video berukuran besar.
Masalahnya, ketika seseorang mengirim tautan TeraBox, peneri-
manya sering diminta memasang aplikasi atau login dulu sebelum bisa menonton.
Bagi pengguna dengan memori ponsel terbatas atau koneksi yang tidak stabil, langkah ini terasa merepotkan.

Selengkapnya di halaman 12 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL
Berkaca Kasus Gibran, DPR Minta Syarat Ijazah Capres-
Cawapres Diperketat dan Diperjelas

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.27 WIB

BANDA ACEH -Persyaratan pen-
didikan bagi calon presiden dan wakil presiden harus tetap diperta-
hankan, bahkan diperketat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selengkapnya di halaman 11 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL
Survei IPO Sebut Raja Juli Antoni Menteri Berkinerja Terburuk, Iftitah Paling Tak Dikenal Publik



BANDA ACEH - Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampa-
paikan, bahwa Raja Juli Antoni adalah sosok Menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapatkan

sentimen paling buruk dari masya-
rakat.
Hal ini disampaikan Dedi saat merilis hasil survei lembaganya yang dilakukan dalam kurun waktu 12 – 21 ...

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL
Tiga Nama Jokowi: Purwoko, Mulyono, dan Joko Widodo — Mana yang Benar?



BANDA ACEH - Isu soal nama lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali men-
cuat.
Klaim yang menyebut nama lahir atau nama kecil Jokowi adalah Purwoko sempat ramai dibicarakan publik, meski Jokowi sendiri membantah mengetahuinya.
Menurut keterangan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Permana (atau Dian Sandi ...

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Bank Aceh ACTION

Selamat dan Sukses
ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.
Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

NASIONAL

Survei IPO Sebut Raja Juli Antoni Menteri Berkinerja Terburuk, Iftitah Paling Tak Dikenal Publik

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.38 WIB



Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan, bahwa Raja Juli Antoni adalah sosok Menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapatkan sentimen paling buruk dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Dedi saat merilis hasil survei lembaganya yang dilakukan dalam kurun waktu 12 – 21 Oktober 2026.

Di mana ketika responden di tanya nama-nama Menteri manakah di bawah ini yang bekerja paling buruk, muncul Menteri Kehutanan dengan 36,6 persen.

“Yang paling buruk Raja Juli dengan 36,6 persen. Disusul Menteri HAM Natalius Pigai 21,8 persen. Menteri PU Dody Hang-

godo 9,4 persen. Nusron Wahid 6,5 persen. Ferry Joko Juliantono 8,3 persen. Yassierli 5,7 persen,” kata Dedi dalam rilis survei via Zoom Meeting yang dikutip Holopis.com, Sabtu (24/10/2026).

Selanjutnya ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan 5,3 persen. Disusul Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan 4,2 persen.

Yang terakhir adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan 3,9 persen. Sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu ada 32,5 persen.

Selain itu, survei IPO juga menangkap sosok menteri dengan tingkat ketidakterkenalan tinggi.

Juaranya adalah Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan skor 82,5 persen.

Disusul dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi dengan 79,2 persen.

Lalu ada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyanti dengan 63,4 persen.

Selanjutnya adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji dengan 52 persen. Lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN/Bappenas) Rachmat Pam-budy dengan 51,7 persen.

Setelahnya adalah Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir dengan 38,9 persen. Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dengan 36,5 persen.

Disusul Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dengan 30,7 persen.

Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Rifky Harsya dengan 28,5 persen, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan 21,6 persen. Sementara yang tidak menjawab atau abstain ada 36,1 persen.

NASIONAL

Pakar: Ada Informasi Gibran Itu Sebenarnya Tidak Lulus SMP di Indonesia

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.37 WIB

BANDA ACEH - Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun ikut mengungkap informasi mengenai riwayat sekolah Gibran di Indonesia.

“Menurut saya, kita penting loh membentuk yang namanya independent fact finding team untuk melihat latar belakang pendidikan Wapres ini,” katanya dalam tayangan YouTube Rakyat Bersatu, dikutip Jumat (23/10/2026).

Dalam penjelasannya, Refly mengaku pernah mewawancarai seseorang bernama Luke Susilo yang disebutkan memiliki informasi mengenai pendidikan Gibran.

Informasi tersebut menyangkut dugaan bahwa Gibran tidak menyelesaikan pendidikan SMP di

Indonesia sebelum melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School (OPSS), Singapura.

“Saya harus mengatakan ada informasi itu, Luke Susilo, saya pernah interview dia,” ungkap Refly.

“Dia katanya pernah mendapatkan informasi misalnya Gibran itu sebenarnya tidak lulus SMP di Indonesia juga,” sambungnya.

Refly kemudian memaparkan dugaan perjalanan pendidikan Gibran saat masih berada di tingkat SMP.

Menurutnya, Gibran diduga pindah ke Singapura ketika masih duduk di kelas 2 SMP dan kemudian bersekolah di OPSS.

“Sekitar kelas 2 SMP, nanti koreksi kalau saya salah, ya biasanya nakalnya anak muda zaman dulu dan saya tidak etis mengata-

kan masalah apa, tapi semua orang tahu soal itu. Kemudian dipindahkan ke Singapura kelas 2 SMP, itulah sebabnya dia masuk Orchid Park Secondary School, itu bisa setingkat SMP plus,” katanya.

Ia juga mempertanyakan masa pendidikan Gibran di Singapura.

Refly mencontohkan apabila Gibran bersekolah di OPSS pada periode 2002-2004, sementara sebelumnya telah menamatkan SMP di Indonesia, maka riwayat pendidikan tersebut perlu dijelaskan.

“Kalau dia sudah tamat SMP, masuk SMP lagi tuh aneh sebenarnya. Terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan Indonesia dan Singapura,” ucapnya.

Tak hanya jenjang SMP, Refly turut menyoroti pendidikan Gibran di UTS Insearch, Austra-

lia, yang disebut sebagai jalur persiapan sebelum melanjutkan studi ke University of Technology Sydney (UTS).

Ia mempertanyakan dokumen yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA.

Refly merujuk pada dokumen yang terungkap dalam persidangan di MK.

Ia menyebut tidak adanya sertifikat penyelesaian pendidikan atau certificate of completion, sementara dokumen yang tersedia berupa sertifikat kehadiran, bukti pendaftaran, dan transkrip nilai.

“Fakta persidangan di MK dia tidak menyertakan certificate of completion, tidak ada sertifikat dia selesai UTS itu, yang ada certificate ...

NASIONAL

8 Kali Reshuffle, Prabowo Disorot Haus Kekuasaan demi Pilpres 2029

Oleh Redaksi · 24 Okt, 16.00 WIB



Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas menyoroti frekuensi perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai delapan kali.

Ia mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja menteri atau justru menjadi instrumen untuk mengakomodasi kepentingan Politik menjelang Pilpres 2029.

Kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (24/10/2026), Fernando mengatakan, pergantian anggota kabinet yang berulang memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan utama Presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

“Kalau mencermati pernyataan tersebut, kemungkinan Presiden Prabowo Subianto di sisa masa jabatannya akan sering melakukan reshuffle kabinet. Pemerintahan Prabowo Subianto masih berjalan dua tahun, tetapi sudah melakukan delapan kali reshuffle kabinet,” ujar Fernando.

Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola. Menurutnya, sejumlah nama yang berada di luar kabinet bisa saja telah disiapkan untuk menggantikan menteri yang sedang menjabat.

“Sama seperti pemain sepak bola, pemain cadangan berada di luar lapangan. Berarti Prabowo sudah mempersiapkan beberapa

nama yang akan dimasukkan dalam kabinet menggantikan para anggota kabinet saat ini,” katanya.

Fernando mempertanyakan apakah pergantian tersebut benar-benar mengutamakan kinerja dan kompetensi. Ia menilai reshuffle berpotensi menjadi sarana mengakomodasi berbagai kelompok politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan.

“Reshuffle dilakukan hanya untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada yang pro dan kontra terhadap pemerintahan bisa menikmati masuk menjadi anggota kabinet. Tujuannya agar bisa memuluskan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2029,” tegasnya.

Fernando bahkan melontarkan kritik keras terhadap arah politik tersebut. “Sehingga semakin memperjelas bahwa Prabowo haus kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan prediksi politik mengenai masa depan kepemimpinan Prabowo. “Namun, sepertinya hal tersebut akan sia-sia karena saya perkirakan Prabowo Subianto tidak akan menuntaskan kepemimpinannya sampai akhir masa jabatannya dan Pilpres 2029 tanpa Prabowo Subianto,” pungkas Fernando.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan prediksi politik Fernando Emas, bukan kepastian mengenai kelangsungan masa jabatan Presiden.

NASIONAL

Hercules Ultimatum Maruarar Sirait: Kau Jangan Pakai Otak Nakal

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.55 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal memperingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) masalah sengketa lahan.

Hercules mengaku mengenal sosok Ara sebelum menjadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Ara selalu memakai otak nakalnya ketika masih berada di partai lamanya.

“Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu, kamu masih di jalur

merah, kamu loncat ke jalur oranye, aku tahu kamu. Ini pejuang, petarung yang aslinya. Untuk pemerintah saat ini, Hercules yang petarung asli, darah merah putih harga mati. Bagaimana pemerintah ini harus dipegang Bapak Presiden Prabowo,” ujar Hercules dalam video yang diunggah Instagram GRIB Jaya, dikutip Jumat (23/10).

“Hei Ara Sirait. Kalau kamu benar aku dukung, tapi kamu masih mau pake otak-otak dulu kamu masih di merah, rampok-rampok terus, sekarang kamu menyelamatkan diri, menempel ke biru, terus kamu mau pakai rampok lagi, terus kamu berhadapan dengan saya,” ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Putusan MK Bisa jadi Alasan Prabowo Ingin Pisah dengan Gibran dan Jokowi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.53 WIB



Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah sesuatu yang akan membebani Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran.

Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat, putusan itu justru sangat mungkin menjadi jalan keluar sekaligus alasan bagi Prabowo dan kubu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Gibran untuk berpisah, lalu menempuh jalan masing-masing di Pemilu 2029.

"Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029," ujarnya

kepada wartawan, Sabtu, 24 Oktober 2026.

"Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja," sambungnya.

MK membacakan putusan tersebut pada Selasa (6/10/2026). Majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran.

Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dan menilai KPU lalai memeriksa syarat administrasi pencalonan.

Istana sendiri menyatakan Presiden tidak akan melakukan intervensi terkait putusan tersebut.

Tanda-tanda perpisahan itu, kata

Hensa, sudah terlihat dari rangkaian sikap Jokowi.

"Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo. Kemudian berbagai peristiwa Politik terjadi, yang bisa terbaca sangat mungkin Prabowo dan Gibran/Jokowi tidak sejalan lagi atau akan menempuh jalan sendiri-sendiri di 2029," ujarnya.

Menurut Hensat, langkah Jokowi bergabung dengan PSI sama saja dengan memajukan jadwal kompetisi pemilu secara implisit.

Partai politik lain, kata Hensat, akan membaca langkah itu sebagai

tanda kesiapan Jokowi, baik dari sisi kekuatan akar rumput maupun logistik.

"Semua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini," tuturnya.

Gibran sendiri, masih kata Hensat, memilih terus berkeliling sambil menabung suara lewat blusukan ala Jokowi, sesuatu yang menurut dia tidak bisa dilakukan Prabowo.

"Mas Gibran jalan-jalan, salaman-salaman. Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik.

NASIONAL

Evaluasi Raja Juli Antoni, Seharusnya Menteri Kehutanan Punya Rencana Mitigasi Karhutla

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.24 WIB



Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Efrain Yerry Tawalujan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi orang paling bertanggung jawab dan layak dievaluasi karena belum maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang 2026.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Efrain Yerry Tawalujan mengatakan, kejadian karhutla bisa dicegah jika Raja Juli selaku menteri sudah punya rencana mitigasi.

"Seharusnya Menteri Kehutanan telah mempersiapkan rencana dan langkah aksi mitigasi bencana yang terukur. Lalu, melibatkan instansi terkait yang ikut bertanggung jawab untuk segera mengatasi karhutla sedini mungkin," kata Yerry, dalam keterangannya, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yerry, Kementerian Kehutanan semestinya menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla. Gencarkan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, pemerintah daerah, serta perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah terdampak.

"Kementerian Kehutanan yang seharusnya menjadi motor penggerak dan mengoordinasikan upaya pemadaman bersama lembaga-lembaga pemerintah lain dan perusahaan-perusahaan perkebunan di lokasi karhutla," ujarnya.

Yerry menyoroti kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya, kabut asap akibat karhutla mengganggu kehidupan masyarakat. Sementara kebakaran juga mengancam habitat satwa liar, termasuk orang utan dan merusak kawasan hutan.

Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi Indonesia di mata negara-negara tetangga.

Karena itu, Yerry berpandangan kinerja Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan perlu dievaluasi.

"Menteri Kehutanan melemahkan kinerja kabinet dan memberatkan Presiden Prabowo. Itu sebabnya kami mengusulkan agar Menteri Kehutanan dievaluasi dan diganti," pungkasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Eks Ajudan Jokowi Dituntut 10 Tahun Penjara Rugikan Negara Rp237 Miliar

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.24 WIB

BANDA ACEH - Letjen TNI Widi Prasetyono, mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset tanah negara di Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa juga menuntut Widi membayar uang pengganti Rp21,05 miliar, denda Rp500 juta, serta pemecatan dari dinas militer. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Perkara ini berkaitan dengan transaksi lahan perkebunan Caruy seluas 716,2 hektare yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp237,09 miliar.

Jaksa menilai Widi terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama tiga terdakwa lain, yakni mantan Asisten Perencanaan

Kodam IV/Diponegoro Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, dan mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan (RSA) Suko Madyo Susilo.

Selain pidana penjara, jaksa meminta Widi dipecat dari dinas militer. Pengabdian selama 33 tahun sebagai prajurit TNI menjadi pertimbangan yang meringankan.

Namun, sikap terdakwa yang dinilai tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan kerugian negara menjadi faktor yang memberatkan.

"Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Dalam perkara tersebut, Widi diduga menerima aliran dana

Rp21,05 miliar melalui rekening perantara milik dua adik iparnya.

Jaksa menguraikan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain membeli tanah, membangun rumah kos di Semarang, membeli kendaraan mewah, dan membiayai usaha peternakan ayam.

Jaksa juga menilai posisi Widi sebagai Pangdam IV/Diponegoro seharusnya menjadi teladan bagi prajurit di bawah komandonya.

Kasus ini bermula dari transaksi lahan perkebunan Caruy di Kecamatan Cipari, Cilacap, senilai Rp237,09 miliar kepada PT Cilacap Segara Artha (CSA).

Lahan tersebut merupakan aset negara yang penguasaannya berada di bawah Kodam IV/Diponegoro melalui Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip).

Meski transaksi berjalan dan PT CSA telah mengeluarkan dana, perusahaan itu disebut tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan lahan tersebut secara sah.

Persoalan pengalihan aset negara itu kemudian menjadi bagian penting dalam perkara korupsi tersebut.

Jaksa turut mengajukan tuntutan terhadap tiga terdakwa lainnya. Wisnu Kurniawan dituntut empat tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp2,76 miliar.

Sementara itu, Sjaiful Nursaid dituntut enam tahun penjara, denda Rp500 juta, pemecatan dari dinas militer, serta uang pengganti sekitar Rp3,22 ...

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.49 WIB

JAKARTA - Peneliti Bonatua Silalahi menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu.

Dia pun menantang Bawaslu berani memanggil Wapres Gibran.

"Jadi kalau ini nanti mereka periksa dulu. Kalau ternyata dibuktikan, mereka bisa panggil. Harapan kita semoga Bawaslu berani memanggil, karena bukti-bukti yang kami bawa ini baru. Saya rasa mereka juga akan tercegang melihat bukti-bukti saya," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Dia meyakini, Bawaslu akan melakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lanjutan.

Namun, dia mendorong Bawaslu agar menggunakan momentum laporan masyarakat ini untuk menagih transparansi dan membuka akses data penataan doku-

men calon dari KPU secara komprehensif.

"Sekaranglah saatnya Bawaslu datang ke KPU untuk meminta akses semua data ini dengan alasan ada laporan dari masyarakat. Sangat disayangkan jika Bawaslu justru meminta data surat keterangan dari pelapor, padahal seharusnya mereka yang memiliki akses tersebut," kata Bonatua.

Apabila dalam pemeriksaan Bawaslu ditemukan unsur pidana pemilu, Bonatua berharap penanganan kasus ini dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan gabungan unsur Bawaslu, polisi dan kejaksaan.

Bonatua membeberkan poin utama materi gugatannya yang menasar KPU dan Gibran.

Terhadap KPU, dia menilai lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah alpa atau sengaja melangkahi prosedur verifikasi syarat calon.

Menurut dia, KPU seharusnya menganalisis pemenuhan syarat pada Pasal 169 huruf r terlebih ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tiga Nama Jokowi: Purwoko, Mulyono, dan Joko Widodo — Mana yang Benar?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 14:30 WIB



Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Isu soal nama lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat.

Klaim yang menyebut nama lahir atau nama kecil Jokowi adalah Purwoko sempat ramai dibicarakan publik, meski Jokowi sendiri membantah mengetahuinya.

Menurut keterangan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Permana (atau Dian Sandi Utama), Jokowi memiliki tiga nama sepanjang hidupnya.

"Nama Pak Jokowi sebenarnya ada tiga. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Baru kemudian diganti menjadi Mulyono, sampai akhirnya diganti Joko Widodo," ujar Dian dalam sebuah perbincangan di YouTube dan kemudian di persidangan.

Dian mengaku mendapat informasi tersebut dari salah satu anggota keluarga Jokowi yang tidak disebutkan namanya.

Klaim ini sempat beredar bersamaan dengan polemik dokumen yang disebut ijazah Jokowi.

Respons Jokowi: Hanya Ingat Mulyono

Jokowi secara langsung menanggapi klaim tersebut saat ditemui di kediamannya di Solo pada Mei 2025.

Ia menegaskan bahwa seingatnya nama kecilnya adalah Mulyono, bukan Purwoko.

"Saya kan waktu kecil ya enggak ngerti nama saya siapa. Yang jelas, seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan. Itu pun diceritakan oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena

sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo," kata Jokowi.

Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui atau pernah mendengar nama Purwoko.

Menurutnya, penggantian nama dari Mulyono menjadi Joko Widodo dilakukan orang tuanya sebelum ia masuk sekolah dasar (SD).

Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa, di mana nama anak yang sering sakit-sakitan kerap diganti agar nasibnya lebih baik.

Konteks dan Perkembangan Terbaru

Nama Mulyono sendiri memang pernah diakui Jokowi sebagai nama masa kecilnya. Mulyono lahir pada 21 Juni 1961 di Solo dari pasangan Notomihardjo dan Sujatmi Notomihardjo.

Nama itu kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

Isu Purwoko kembali muncul dalam persidangan terkait kasus yang melibatkan Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Oktober 2026.

Dian Sandi yang menjadi saksi kembali menyebut nama tersebut, dan Dokter Tifa bahkan menyinggung potensi keterangan palsu jika klaim itu tidak bisa dibuktikan, dengan rencana mengonfrontasi langsung kepada Jokowi.

Hingga saat ini, tidak ada dokumen resmi atau pernyataan Jokowi yang membenarkan bahwa namanya pernah Purwoko.

Satu-satunya nama lain yang secara terbuka diakui Jokowi adalah Mulyono.

NASIONAL

5 Poros Disebut Siap Tantang Prabowo di 2029, Siapa yang Punya Tiket Terkuat?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15:10 WIB



Presiden Prabowo Subianto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan lima poros Politik yang dinilai berpotensi menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Poros pertama, menurut Adi, adalah poros Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Politikus yang akrab disapa KDM itu dinilai berpeluang menjadi penantang kuat Prabowo apabila memilih berpisah dari Partai Gerindra dan berhasil memperoleh dukungan dari partai politik lain.

"Tapi beda ceritanya kalau Pak KDM pisah jalan tidak lagi bersama dengan Gerindra dan misalnya mendapatkan salah satu dukungan dari salah satu kekuatan partai politik di negara kita, ya KDM bisa melaju itu PR terbesarnya," ujarnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Sabtu (24/10).

Poros kedua adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adi menilai Anies berpotensi maju apabila Partai Gerakan Rakyat berhasil lolos sebagai peserta Pemilu dan mampu memperoleh dukungan dari partai-

partai lain, termasuk partai yang memiliki kursi di parlemen.

"Anies tinggal cari tiket apakah Partai Gerakan Rakyat lolos misalnya sebagai salah satu peserta pemilu dan kemudian mampu mendapatkan dukungan dari partai-partai yang lain salah satunya lolos ke parlemen misalnya tinggal kita tunggu," kata Adi.

Selanjutnya, Adi juga memasukkan poros Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), poros Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta poros PDI Perjuangan (PDIP) yang berpotensi diwakili oleh Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Pramono Anung.

Menurut Adi, kelima poros tersebut merupakan kekuatan politik yang paling berpeluang menghadapi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029.

"AHY begitu pun Gibran termasuk juga PDIP. Itu adalah yang saya sebut lima kemungkinan poros yang sangat mungkin akan maju di 2029 yang akan head to head dengan Pak Prabowo Subianto," tandasnya.

NASIONAL

Dua Anak Menhaj Gus Irfan jadi Tenaga Ahli Kemenhaj, Said Didu: Menjijikkan!

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17:36 WIB



BANDA ACEH -Beredar kabar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengangkat dua anak kandungnya sebagai tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Keduanya adalah Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz.

Informasi pengangkatan kedua anak Gus Irfan tersebut dibenarkan sumber redaksi di lingkungan internal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Polemik ini mencuat setelah beredar dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Men-

teri Haji dan Umrah Nomor 3/2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Dokumen tersebut memuat sembilan nama, termasuk Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz yang disebut sebagai putra Gus Irfan.

Sontak, kabar pengangkatan tenaga ahli dari lingkungan keluarga inti Gus Irfan ini menuai beragam kritik. Salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

"Memalukan dan menjijikkan!" tulis Saidu Didu merespons polemik tersebut, Jumat, 23 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jimly Minta Publik Move On dari Polemik Ijazah Gibran: Ya Gimana, Dia Sudah jadi Wapres

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20:28 WIB

BANDA ACEH - "Tidak usah baper," menjadi pesan tegas yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta masyarakat lebih rasional dan dewasa dalam menyikapi dinamika Politik yang masih berlangsung setelah Pilpres 2024. Jimly menilai perdebatan berkepanjangan mengenai latar belakang pendidikan Gibran hanya menghabiskan waktu dan energi. Menurutnya, polemik tersebut tidak mengubah status Gibran yang telah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Ada orang ngabisin waktunya urusan ijazah. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, ya bagaimana? Dia sudah jadi

wapres," tuturnya, Jumat (23/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan ketika isu ijazah Gibran kembali menjadi perhatian publik. Jimly mengingatkan bahwa masyarakat perlu menerima realitas politik yang sudah terbentuk tanpa terus dibawa sentimen pribadi terhadap sosok yang kini menduduki jabatan wakil presiden.

Ia juga menyinggung hubungan politik Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jimly, Prabowo sendiri yang meminta Gibran menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024, sehingga keputusan tersebut merupakan bagian dari pilihan politik yang membentuk pemerintahan saat ini.

"Presiden sendiri yang minta supaya Gibran menjadi wakilnya. Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Tidak

mungkin Pak Prabowo mau memberhentikan wakilnya, sedangkan dia sendiri yang minta Gibran jadi wapresnya," kata Jimly.

Pernyataan itu sekaligus menjadi alasan Jimly menilai pemberhentian Gibran oleh Prabowo tidak mungkin terjadi di tengah polemik yang kembali mencuat. Ia menempatkan keputusan pencalonan pada Pilpres 2024 sebagai konteks penting dalam memahami posisi politik keduanya.

Meski demikian, pandangan Jimly mengenai polemik tersebut merupakan penilaiannya terhadap situasi politik yang berlangsung. Pesannya kepada masyarakat tetap sama, yakni menyikapi perbedaan pendapat secara dewasa dan tidak membiarkan sentimen pribadi mendominasi perdebatan.

"Tidak usah baper," pungkas Jimly.

NASIONAL

Soal Hasyim Munafik, Doli Kurnia: Dipecat KPU Kok Malah jadi Komisaris?

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13:37 WIB

BANDA ACEH -Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung angkat bicara perihal tuduhan dari mantan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Pasalnya, Hasyim menuding Doli Kurnia bersikap munafik dan lupa ingatan.

Doli Kurnia pun menepis tuduhan tersebut. Ia bahkan mengungkap rekam jejak Hasyim yang kelam selama menjadi Komisiner KPU.

"Dia menuduh saya munafik. Sebetulnya saya bilang, dia itu sedang menjelaskan dan mengisahkan tentang dirinya sendiri," ungkapnya, saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast di YouTube bertajuk ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hanura Ingatkan Prabowo Jangan Salah Pilih “Pembantu”

Oleh Redaksi · 24 Okt, 12.42 WIB



BANDA ACEH -Visi besar Presiden Prabowo Subianto dinilai belum diterjemahkan secara optimal oleh jajaran menteri. Karena itu, Prabowo didorong mengevaluasi kabinet dan melakukan perombakan pada awal 2027.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella mengatakan, gagasan Prabowo melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih memiliki orientasi kerakyatan. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum berjalan sesuai harapan.

“Sebenarnya ide-ide besar Pak Prabowo sangat humanis, mulai dari MBG agar tidak ada lagi anak bangsa kelaparan, hingga Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi tengkulak yang menjerat petani,” ujar Rio usai konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura bersama pengurus dan legislator Hanura se-Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Kendari, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut Rio, persoalan utama terletak pada kemampuan para

menteri menerjemahkan visi dan misi Presiden menjadi kebijakan serta pelaksanaan yang efektif.

“Persoalannya ada pada tingkat aplikasi. Apa yang dicita-citakan dan digagas oleh Pak Prabowo sebagai presiden, tidak bisa diterjemahkan oleh para menternya,” tegasnya.

Atas dasar itu, Rio mendorong Prabowo mengubah komposisi kabinet dengan lebih mengutamakan profesionalisme dibandingkan akomodasi Politik dan balas budi kepada tim sukses. Ia juga menilai ukuran kabinet yang besar berpotensi memperpanjang koordinasi dan memperlambat pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan mulai dari tingkat menteri hingga wakil menteri.

“Warna kabinet harus mulai diubah menjadi wajah profesional, agar ide besar presiden bisa diwujudkan. Kabinet kerja atau jaken kabinet harus jadi orientasi ke depan,” kata Rio.

Ia menyarankan reshuffle dilakukan pada awal 2027 agar pelak-

sanaan APBN tahun tersebut ditangani oleh jajaran menteri kompeten. Sebab dua tahun ke depan menjadi periode penting bagi Prabowo-Gibran untuk merealisasikan program kerakyatan sebelum memasuki tahun politik.

“Tahun keempat sudah masuk tahun politik. Presiden tidak akan bisa fokus lagi pada persoalan kerakyatan. Sebab itu, dua tahun ke depan adalah waktu emas bagi Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Di luar evaluasi pemerintahan, Rio juga mengapresiasi konsolidasi Hanura di Sulawesi Tenggara yang telah merampungkan pembentukan 221 Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau kepengurusan tingkat kecamatan. Ia berharap penguatan struktur partai di daerah dapat menjadi modal menghadapi Pemilu 2029.

“Apa yang kami lakukan hari ini, bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara.

NASIONAL

Sebut Prabowo Penganut Sosialisme, Rocky Gerung Diketawakan Profesor Australia, Disuruh Baca Lagi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.02 WIB



Pakar ekonomi Politik dan Studi Kawasan Asia di Melbourne University, Prof. Vedi R Hadiz (kanan). Filusuf/Akademis dan Anggota Watimpres, Rocky Gerung. FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Pakar ekonomi Politik dan Studi Kawasan Asia di Melbourne University, Prof. Vedi R Hadiz, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia mengkritik mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga food estate.

Scholar dengan kredensial tinggi di kajian wilayah itu menilai sederet kebijakan tersebut telah menyedot anggaran APBN yang kelewat boros dan lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang kesejahteraan masyarakat.

Vedi menilai pelaksanaan berbagai program skala nasional tersebut sangat menguras keuangan

negara tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga.

Ia menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti kasus keracunan anak-anak pada program MBG serta indikasi kronisme dalam proyek ketahanan pangan.

“Pemborosan uang untuk program-program yang enggak jelas, kegunaannya buat apa, kecuali buat kepentingan-kepentingan politik mereka aja, tidak buat kesejahteraan rakyat,” ujar Vedi Hadiz dikutip dari Threads, Okyy Madasari.

Ia menambahkan bahwa program MBG sangat dipertanyakan hasilnya, sementara Kopdes Merah Putih dinilai tidak jelas kontribusinya terhadap perputaran roda ekonomi lokal.

Senada dengan Kopdes, proyek food estate justru lebih banyak

memelihara kroni bisnis Prabowo ketimbang mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Selain menyoroti efektivitas program pemerintah, Vedi juga menyentil pernyataan anggota Wantimpres Rocky Gerung yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menganut dan mengamalkan paham sosialisme dalam kebijakan ekonominya.

Sambil berseloroh, Vedi menyarankan Rocky untuk mempelajari kembali konsep serta teori dasar sosialisme secara mendalam.

“Masalah Rocky Gerung ngomong Prabowo itu menganut dan mengamalkan paham sosialisme, pesan saya Rocky perlu baca lagi tentang sosialisme haha,” tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Komaruddin Watubun: Jadi Satpam Saja Berijazah, Wapres Gibran?

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.30 WIB



Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan, rakyat kecil yang sekedar mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup lewat lamaran menjadi Satpam atau cleaning servis saja harus berijazah.

“Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia untuk urusan ijazah sebagai syarat mutlak atau Boarding Pass menjadi Wakil Presiden saja menjadi pro-kontra yang tidak berkesudahan,” kata Komaruddin, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau bertanya kepada saya sebagai anggota DPR-RI yang diberi tiga fungsi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu adalah fungsi pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia maka perlu DPR melaksanakan fungsi tersebut untuk memastikan keabsahan

Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” kata politisi senior PDI Perjuangan itu.

Penggunaan fungsi pengawasan oleh DPR RI, katanya, juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum.

“Ini sekaligus menjujung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Jadi setiap warga negara sama di mata hukum,” pungkas Komaruddin Watubun.




Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Angkat Dua Anaknya Jadi Tenaga Ahli, Menhaj Gus Irfan Disentil: Kiamat Sudah Dekat

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.55 WIB



BANDA ACEH — Pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya menuai sorotan.

Pengamat Politik Saiful Mujani bahkan melontarkan sindiran tajam terhadap keputusan yang diambil Gus Irfan.

Sebab dinilai memunculkan pertanyaan tentang profesionalisme dan potensi nepotisme di lingkungan pemerintahan.

Kritik itu disampaikan Saiful melalui akun X miliknya, @saiful_mujani, Jumat (23/10/2026).

Saiful menyoroti praktik seorang pejabat yang menunjuk anaknya sendiri untuk menjadi penasihat.

“Bapak angkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri

haji dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful.

Pernyataan tersebut menambah panjang polemik setelah nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, dua putra Gus Irfan, tercantum dalam dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli.

Pencantuman nama kedua putra Gus Irfan memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan, kualifikasi, transparansi seleksi, hingga potensi konflik kepentingan.

Meski demikian, dugaan nepotisme tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta.

Kejelasan mengenai proses penunjukan, persyaratan jabatan, dan kompetensi masing-masing tenaga ahli menjadi kunci untuk menjawab kritik publik.

Gus Irfan Buka Suara soal Keterlibatan Kedua Putranya

Gus Irfan sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan anak-anaknya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), lembaga yang mulai dibangun pada akhir Oktober 2024 sebelum berkembang menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Gus Irfan, pada masa awal pembentukan BP Haji, lembaga itu belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai. Situasi tersebut membuatnya harus mengandalkan bantuan orang-orang terdekat untuk memulai pekerjaan.

“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” kata Gus Irfan di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah.

Ia menjelaskan, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat itu mendapat dukungan dari tim Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Gus Irfan mengaku dibantu para santri dan anak-anaknya.

Mereka, menurut dia, turut membantu pembentukan BP Haji selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.

“Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya.

NASIONAL

Presiden PKS Minta Fraksinya Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Wapres

Oleh Redaksi · 24 Okt, 19.34 WIB



Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzamil Yusuf menginstruksikan fraksi PKS agar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.

Demikian diungkapkan oleh politisi senior PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera saat dihubungi monitorindonesia.com, Sabtu (24/10/2026).

“Presiden PKS AMY (Al Muzzamil Yusuf) sudah minta ditindaklanjuti keputusan MK,” kata Mardani Ali Sera.

Selain menindaklanjuti putusan MK, Presiden PKS, tambahnya, juga minta dilakukan perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan melakukan komunikasi dengan partai Politik lain.

“Juga diminta agar dilakukan perbaikan penyelenggara pemilu dan komunikasi dengan partai lain,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan, sudah sepatutnya DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau bertanya kepada saya sebagai anggota DPR-RI yang diberi tiga fungsi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu adalah fungsi pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia maka perlu DPR melaksanakan fungsi tersebut untuk memastikan keabsahan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” kata Komaruddin.

NASIONAL

Komaruddin Watubun Minta DPR Awasi Keabsahan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 24 Okt, 16.04 WIB



Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan, sudah sepatutnya DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau bertanya kepada saya sebagai anggota DPR-RI yang diberi tiga fungsi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu adalah fungsi pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia maka perlu DPR melaksanakan fungsi tersebut untuk memastikan keabsahan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” kata Komaruddin saat dimintai tanggapannya terkait wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket pasca putusan MK terkait ijazah Gibran, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Penggunaan fungsi pengawasan oleh DPR RI, kata politisi senior

PDI Perjuangan itu juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum.

“Ini sekaligus menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Jadi setiap warga negara sama di mata hukum. Jangan rakyat kecil yang sekedar mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup lewat lamaran menjadi satpam atau cleaning servis saja harus berijazah, sementara Wakil Presiden Republik Indonesia untuk urusan ijazah sebagai syarat mutlak atau Boarding Pass menjadi Wakil Presiden saja menjadi pro-kontra yang tidak berkesudahan,” kata Komaruddin.

Terkait sikap partai ataupun fraksi PDI Perjuangan, ia tak ingin berkomentar.

“Kalau adinda tanya sikap partai tanya kepada ketua dan sekretaris Fraksi,” katanya singkat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Sepupu Ngaku Tak Tahu Pasti soal Jokowi Kuliah di UGM, Hanya Tahu dari Obrolan Keluarga

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.29 WIB

BANDA ACEH - Sidang lanjutan perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyasuma alias Dokter Tifa kembali menghadirkan kesaksian yang menarik perhatian.Dumatno Budi Utomo, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi, tetapi tidak mengetahui secara terperinci riwayat pendidikan sang mantan presiden.

Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Di hadapan majelis hakim, Dumatno menjelaskan bahwa hubungan keluarganya dengan Jokowi berasal dari garis kakek dan nenek

mereka yang merupakan kakak beradik.

Meski masih memiliki ikatan keluarga, Dumatno mengatakan interaksi intensif dengan Jokowi baru dirasakannya ketika masa sekolah. Keduanya juga bertemu dalam berbagai acara keluarga dan perayaan hari raya yang rutin digelar di Solo.

Ketika majelis hakim dan tim kuasa hukum terdakwa menggali informasi mengenai pendidikan tinggi Jokowi, Dumatno mengaku hanya mengetahui bahwa Jokowi pernah menempuh studi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti kapan Jokowi mulai

kuliah maupun menyelesaikan pendidikannya.

“Secara langsung kalau status terkait itu (perkuliahan Jokowi) saya tidak (tahu). Tapi kan di (cerita) keluarga dulu, beliau kan cita-citanya ingin untuk kerja di kehutanan gitu,” ungkap Dumatno.

Ia menjelaskan, informasi mengenai pendidikan Jokowi lebih banyak didengarnya melalui obrolan di lingkungan keluarga besar. Karena itu, ia tidak dapat memastikan tahun-tahun yang berkaitan dengan perjalanan akademik Jokowi.

“Kalau tahun-tahun pastinya saya tidak ingat, tetapi hal itu sering menjadi bahan obrolan dalam pertemuan keluarga besar,” kata Dumatno.

Dumatno juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berusia sekitar delapan tahun ketika Jokowi menyelesaikan kuliah. Kondisi tersebut membuatnya tidak mengikuti secara langsung proses pendidikan yang dijalani Jokowi hingga lulus.

Tak hanya soal riwayat kuliah, Dumatno turut menyampaikan keterangannya ketika ditanya mengenai ijazah Jokowi yang menjadi pokok polemik dalam perkara tersebut. Ia mengaku belum pernah melihat dokumen pendidikan itu secara langsung.

“Terkait ijazah yang ditampilkan ini, beliau juga belum pernah (menunjukkannya),” sebut Dumatno.

NASIONAL

Angkat Anak Jadi Tenaga Ahli Kemenhaj, Gus Irfan Singgung Kekurangan Pegawai

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.49 WIB



BANDA ACEH — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan awal keterlibatan anak dan sejumlah santrinya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), sebelum sebagian dari mereka diangkat menjadi tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Gus Irfan mengatakan, anak dan para santrinya ikut membantu ketika BP Haji belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai.

Mereka disebut bekerja secara sukarela selama tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.

Keterlibatan tersebut bermula setelah Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil

Anzar Simanjuntak dilantik memimpin BP Haji pada akhir Oktober 2024.

Saat itu, menurut Gus Irfan, BP Haji belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas kelembagaan.

"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya apa-apa," kata Gus Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dalam kondisi tersebut, Irfan mengaku dibantu para santri dan anaknya untuk mempersiapkan pembentukan BP Haji.

"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan

mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," ujarnya.

Seiring perkembangan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli. Gus Irfan menyebut pengangkatan dilakukan terhadap pihak yang dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Sementara itu, sebagian lainnya kembali menjalankan aktivitas masing-masing, termasuk ke pondok pesantren.

"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke

pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu," tuturnya.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menggunakan seluruh alokasi posisi tenaga pendukung yang tersedia untuk menteri.

"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," katanya.

Gus Irfan Paparkan Kekurangan Pegawai Kemenhaj

Di luar polemik pengangkatan tenaga ahli, Gus Irfan turut memaparkan persoalan keterbatasan sumber daya manusia di Kemenhaj.

NASIONAL

Jimly Asshiddiqie Usul Presiden Tak Perlu Ijazah, Netizen: Termasuk jadi PNS Gak Usah Pakai Ijazah!

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.19 WIB



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar syarat ijazah formal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dihapus dari Undang-Undang Pemilu memicu beragam reaksi di media sosial, khususnya di platform X.

Menanggapi usulan tersebut, seorang pengguna X dengan akun @kohlervo**** menyindir agar aturan yang sama juga diterapkan secara merata di seluruh instansi negara, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Semua instasi dan lembaga juga harus diperlakukan sama dong @JimlyAs Masuk TNI, Masuk Polisi, Jadi Jaksa, Jadi Hakim, Jadi PNS, GAK USAH PAKAI IJAZAH!!!" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (24/10).

Sebelumnya, Jimly mengusulkan agar syarat ijazah bagi capres maupun cawapres diadakan. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kepercayaan rakyat seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan pemimpin, bukan semata-mata gelar akademik.

Ia berpendapat persyaratan pendidikan yang ketat lebih tepat diterapkan pada jabatan-jabatan profesional di birokrasi, seperti ASN.

"Walaupun sebetulnya yang ketat pakai ijazah itu (seharusnya) untuk ASN. Sedangkan untuk Politik, ini soal perwakilan. Untuk pendidikan politik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, presiden dan wakil presiden enggak usahlah (pakai syarat ijazah). Supaya ada orang yang enggak sekolah sekalipun, kalau rakyat bisa percaya, kenapa tidak?" urai Jimly dalam Dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik.

NASIONAL

395 Orang Keracunan MBG, Kepala SPPG Cirebon Dicapot

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 5 di Kota Cirebon, Jawa Barat, dicopot setelah investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dapur. Pencopotan ini menyusul insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 395 orang.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengungkapkan pengelola SPPG Kalijaga 5 didapatkan memesan bahan atau makanan jadi dari mitra maupun vendor luar untuk kemudian diolah kembali. Praktik tersebut melanggar petunjuk teknis (juknis) BGN.

"Mereka memesan dari mitra, dari vendor, memesan dari vendor, kemudian diolah. Nah, itu sebe-

narnya sudah dilarang di juknis kami," kata Yulian.

Temuan itu diperoleh setelah tim KPPG bersama Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN turun langsung ke lokasi. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik dapur, manajemen pengelolaan, hingga tata kelola operasional SPPG.

Atas pelanggaran tersebut, KPPG berkoordinasi dengan BGN pusat dan menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap kepala SPPG. Namun, penanganan kasus belum berhenti di situ. BGN masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan tindak lanjut.

"Untuk saat ini, yang bersangkutan itu sudah dicopot dari Kepala SPPG.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Doli Kurnia Sarankan Nusron Wahid Hadapi KPK: Kalau Tak Merasa Melanggar Datang Saja

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.31 WIB

BANDA ACEH - Kasus hukum yang menyeret nama Politikus Partai Golkar Nusron Wahid, direspons Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Sebagai seorang sahabat, Doli menyarankan agar Menteri ATR/BPN itu memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor tersebut.

Menurut Doli, sebagai warga negara yang patuh hukum, Nusron tidak boleh menghindari dan berani menghadapi proses yang sedang berjalan.

"Kepada sahabat saya, Saudara Nusron, saya kira kalau memang kita merasa tidak pernah melaku-

kan pelanggaran apa-apa, kalau dipanggil ya datang saja. Jelaskan saja semuanya," kata Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast di YouTube bertajuk "Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAR FEBBY" dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Doli berpandangan bahwa kehadiran Nusron Wahid untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan penyidik KPK sangat penting.

Oleh karena itu, sikap kooperatif dari pihak-pihak yang bakal digali keterangannya sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Doli mengingatkan bahwa polemik hukum yang terus bergulir tersebut harus segera diakhiri dan

tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.

"Ini polemik yang harus segera diakhiri, jangan berkepanjangan. Apalagi ini masalah hukum. Hukum tidak boleh dipertainkan," tegas Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar ini.

Doli khawatir, jika kejelasan hukum dibiarkan menggantung, tatanan bernegara akan rusak dan berubah menjadi hukum rimba yang bisa memancing kemarahan publik.

Di sisi lain, Doli juga menyoroti langkah komisi antirasuah. Ia meminta KPK untuk segera memberikan penjelasan yang utuh terkait duduk perkara yang menyeret nama koleganya tersebut.

Ia mengaku sempat menyayangkan sikap KPK sebelumnya yang secara tiba-tiba mengumumkan

nama Nusron, padahal informasi terkait dugaan keterlibatannya belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kepastian, Doli memperingatkan bahwa kasus ini akan membawa efek domino yang sangat merugikan.

Kerugian tersebut tidak hanya ditanggung secara personal oleh seorang Nusron Wahid.

"Ini bukan hanya menyangkut soal nama baik teman saya sendiri. Ini akan menyangkut nama baik kami semua di Partai Golkar," tegas Doli.

Lebih jauh, Doli menyebut skandal hukum ini berpotensi mencoreng wajah pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Oleh Redaksi · 24 Okt, 08.45 WIB



BANDA ACEH - Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, merasa ada yang janggal terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang minta penghapusan unsur kerugian negara sebagai bentuk korupsi.

Mulyanto berpendapat usul itu bertolak belakang dengan semangat negara memberantas dan menghukum pelaku korupsi.

"Saya tidak setuju dengan wacana penghapusan kerugian negara (KN) dalam klausul korupsi, yang dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan (DEN). Penyesuaian hukum pemberantasan korupsi dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Sejak awal kita telah

mengadopsi aturan UNCAC ini," terang Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 23 Oktober 2026.

Ia menambahkan reformasi hukum justru harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kekayaan negara, terutama dalam pengelolaan aset publik berskala besar, seperti misalnya Danantara.

Menurut Mulyanto, sesuai UNCAC, tindak pidana korupsi tidak harus mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan negara. Namun, ketentuan tersebut bukan berarti kerugian negara tidak dapat menjadi unsur tindak pidana korupsi.

Justru UNCAC menegaskan, bahwa korupsi tidak harus menimbulkan kerugian negara. Dan ini bukan berarti kerugian negara

harus dikeluarkan dari delik korupsi.

"Saya rasa ini perlu dipahami secara tepat agar reformasi hukum kita tidak kehilangan arah," ujarnya.

Menurut Mulyanto, UNCAC justru mengatur korupsi secara lebih luas, tidak terbatas pada penyuapan, tetapi juga mencakup penggelapan aset publik, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan fungsi jabatan. UU Tipikor sudah memuat klausul itu.

Karena itu, pembaruan hukum antikorupsi perlu diarahkan untuk memperkuat instrumen pencegahan dan penindakan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Mulyanto juga memahami pentingnya kepastian

hukum bagi pengambil keputusan publik dan pengelola BUMN. Tidak setiap kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi. Risiko bisnis yang wajar dan keputusan profesional yang diambil dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

Namun, perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan sistem pengawasan yang kuat.

"Jangan sampai kepastian hukum bagi pengambil keputusan justru mengurangi akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Keduanya harus berjalan beriringan," tegasnya.

Dalam konteks Danantara, Mulyanto menilai prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting mengingat besarnya aset dan kewenangan pengelolaan investasi yang berada dalam lingkup lembaga tersebut.

NASIONAL

Wakil Rakyat Kota Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Polisi Kelimpungan Panggil Gubernur Riau

Oleh Redaksi · 24 Okt, 09.33 WIB



BANDA ACEH -Polres Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta mengusut kasus dugaan penganiayaan terhadap Anggota DPRD Kota Pekanbaru, berinisial F oleh sesama rekan sejawat berinisial Z di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta.

Dugaan penganiayaan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Agustus 2026.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kopol Muhammad Esha menjelaskan proses hukum berjalan berdasarkan laporan yang diterima polisi, bukan kepentingan Politik pihak mana pun.

"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober 2026.

Sejauh ini, Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV), sampai dengan mengirim surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau guna meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.

"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjut. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," tutur Esha.

Sejauh ini, proses penyelidikan saat ini menghadapi kendala terkait permohonan izin atau persetujuan tertulis yang telah disampaikan kepada Gubernur Riau.

Polisi pun masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan langkah selanjutnya.

"Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, F dan Z bertemu di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali ke Pekanbaru setelah rombongan anggota DPRD itu berkonsultasi di Kemendagri. Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mengeceknya. Peristiwa itu disebut sempat dilerai oleh anggota DPRD lainnya yaitu Rois dan Victor Parulian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Istigasah Kubro, KPK NU: Tangkap dan Adili Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.44 WIB

JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan KPK Nahdlatul Ulama (KPK NU) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan mengadili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Desakan itu disampaikan melalui Istigasah Kubro bersama kiai kampung di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore, 23 Oktober 2026.

Koordinator KPK NU, Muhammad Sholihin, menuding sejumlah pihak telah mencederai marwah NU.

Ia menyebut Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf

alias Gus Ipul, Juri Ardiantoro, serta sejumlah kiai sebagai pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban terkait polemik dugaan penggunaan uang hasil korupsi untuk kepentingan Muktamar ke-35 NU di Jombang.

"Bagi kami KPK NU, itu berarti oknum anasir-anasir jahat yang coba menjatuhkan marwah Nahdlatul Ulama, betul?" ujar Sholihin dalam orasinya yang disambut jawaban setuju dari massa.

Sholihin juga mempersoalkan proses pemilihan Rais Aam PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Ia mengklaim mekanisme tersebut tidak mencerminkan pilihan mayoritas peserta muktamar.

"Tapi Nusron, Gus Ipul, dan juga Juri Ardiantoro berada di dalam satu meja melakukan anasir jahat untuk memilih Kiai Haji Miftachul Choer sebagai Rais Aam, padahal Kiai Haji Miftachul Choer adalah bukan suara terbanyak!" katanya.

Menurut Sholihin, mayoritas peserta muktamar memilih KH Nurul Huda Djazuli.

Ia menilai proses yang dipersoalkannya itu bermasalah secara moral dan bertentangan dengan aturan di lingkungan NU.

Atas dasar itu, ia meminta KPK menindaklanjuti dugaan yang disuarakan massa aksi.

Sholihin menuding Nusron sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penggunaan uang hasil

korupsi dalam penyelenggaraan muktamar.

Ia juga mempertanyakan alasan Nusron bepergian ke luar negeri ketika dipanggil penyidik KPK sebagai saksi.

"Maka kami hadir yang kedua kalinya, KPK NU dalam rangka Hari Santri Nasional.

KPK NU menegaskan kembali dengan tema aksi ini istighosah kubro bersama kiai kampung agar KPK RI jangan takut, jangan bimbang, segera tangkap dan adili Nusron CS, betul?" serunya.

Seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, massa mengenakan kaus putih bertuliskan KPK NU dan membawa bendera Merah Putih serta bendera hijau berlogo NU.

NASIONAL

Demi Karier Politik Kaesang, Jokowi Diprediksi Tak Ambil Alih PSI

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.41 WIB

BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpeluang menolak tawaran menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) demi menjaga marwah putranya, Kaesang Pangarep, yang saat ini memimpin partai tersebut.

Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, meski memiliki peluang besar menggantikan Kaesang, Jokowi kemungkinan tetap mempertahankan posisi ketua umum untuk putranya.

Menurut Jamiluddin, Jokowi merupakan sosok yang sangat diidolakan sebagian kader PSI. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron bahwa banyak kader di daerah menginginkan Jokowi menjadi ketua umum.

"Jadi, Jokowi memang sangat diidolakan oleh sebagian kader PSI. Bahkan Jokowi dianggap role

model di internal PSI," kata Jamiluddin dalam keterangannya, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai, PSI memang membutuhkan nahkoda baru untuk mendongkrak elektabilitas partai. Sebab, selama dipimpin Kaesang, elektabilitas PSI dinilai tidak meningkat, bahkan menurun.

Penetapan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI juga disebut belum mampu memperbaiki elektoral partai. Jamiluddin menilai, dari kader yang ada saat ini, Jokowi memiliki daya tarik paling kuat untuk membesarkan PSI dan mengantarkannya ke Senayan.

Namun, mengambil alih kepemimpinan PSI dinilai berisiko menjatuhkan marwah Kaesang. Jokowi disebut tidak ingin putranya memiliki catatan politik bahwa dirinya gagal menjadi ketua umum karena digantikan sang ayah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Dana Bencana Dikorupsi, Kemana Hati Nurani?

Oleh Yuli Emamarini · 24 Okt, 16.48 WIB



Gambar ini menggambarkan dengan sangat jelas ironi dan kezaliman yang terjadi - di saat rakyat kehilangan segalanya akibat bencana, ada oknum yang justru memperkaya diri dari dana yang seharusnya menjadi harapan mereka. FOTO/AI for HAI.

Pergi ke pasar membeli ikan Ikan disimpan di dalam peti Bencana datang membawa kesedihan Malah dikorupsi mereka tak punya hati

ASANYA tidak ada kata-kata lagi yang pantas diucapkan untuk mereka yang tega melakukan korupsi dana bencana di negeri ini.

Bencana sudah membawa luka dan kerugian yang tidak sedikit untuk para korban. Mereka membutuhkan bantuan agar kehidupan mereka bisa kembali pulih.

Namun, mirisnya bantuan yang sangat mereka butuhkan justru diduga menjadi bancakan bagi oknum tertentu alias dikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Oktober lalu melakukan operasi tangkap tangan

(OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi Dana Siap Pakai (DSP).

Diduga praktik ini telah berlangsung sejak 2022. Diduga ada penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung yang terafiliasi dengan salah satu tersangka.

Nilai pengadaan tersebut ditaksir mencapai angka Rp 148 miliar selama periode 2024-2026.

Korupsi dana bantuan ini bukan kejahatan biasa, ini adalah kezaliman yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tega mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang dialami oleh para korban bencana, mulai dari banjir dan

tanah longsor di Sumatera, gempa di NTT, karhutla di Kalimantan, Jambi, Palembang dan Papua.

Orang yang diberi amanah untuk menangani bencana, justru memberikan bencana tambahan bagi para korban.

Semua ini terjadi karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya manusia tidak jauh dari agama dan tidak memiliki benteng keimanan dalam dirinya.

Sehingga mereka tidak sadar bahwa setiap perbuatannya akan diawasi oleh Allah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak takut melakukan kezaliman karena tidak ada keimanan akan hari akhirat.

Sistem kapitalis menjadikan materi sebagai tujuan, dan tidak jarang orang melakukan apapun demi keuntungan sekalipun itu menimbulkan mudharat bagi orang lain.

Sistem ini juga melahirkan para pejabat yang krisis integritas, membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, suap menyuap, menyalahgunakan kewenangan, hingga menzalimi orang lain.

Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemimpin pada para pembantu di bawahnya.

Korupsi bukan lagi menjadi anomali, melainkan penyakit bawaan dan budaya di masyarakat.

Sistem peradilan hari ini pun tidak tegas bahkan sangat ramah bagi para koruptor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



KOMUNITAS

Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat Salurkan Santunan Rp20 Juta untuk 12 Anak Yatim

Oleh Hamdani · 23 Okt, 21.54 WIB

ACEH BESAR – Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menyalurkan santunan kepada 12 anak yatim dengan total dana sebesar Rp20 juta, Kamis (22/10/2026). Penyaluran tersebut merupakan santunan periode III tahun 2026.

Ketua Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat, Drs. Tgk. H. M. Aji Adam, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyaluran santunan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk membantu anak-anak yatim sekaligus memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat kembali menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim untuk periode III

tahun 2026, dengan total dana sebesar Rp20 juta kepada 12 anak yatim. Kami berharap santunan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka serta menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial kita bersama,” ujar Aji Adam.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk mendukung penyaluran santunan tersebut. Menurutnya, partisipasi para dermawan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan sosial bagi anak-anak yatim di Gampong Tanjong Seulamat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah berkontribusi. Semoga setiap kebaikan yang diberikan

menjadi amal ibadah, mendapat rida Allah SWT, serta dibalas dengan keberkahan dan kelapangan rezeki. Amin ya Rabbal ‘alamin,” tambahnya.

Penyaluran santunan diberikan kepada 12 anak yatim tersebut dengan besaran masing-masing Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Tgk H.M. Aji Adam berharap kegiatan santunan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi penguat semangat kebersamaan, kepedulian, serta ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Penyaluran santunan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat dalam memperhatikan kesejahteraan anak yatim melalui pengelolaan dan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.[]

NASIONAL

Jimly Asshiddiqie: Politisi Tanpa Gelar Akademik Tetap Berhak Memimpin

Oleh Redaksi · 23 Okt, 21.07 WIB

BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar syarat ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden dikaji untuk dihapuskan.

Menurut dia, dalam sistem demokrasi, mandat rakyat semestinya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin Politik.

Dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik, Jimly membacakan persyaratan bagi pejabat politik yang dipilih melalui pemilu (elected office) dengan aparat sipil negara (ASN).

Ia menilai persyaratan pendidikan yang ketat lebih relevan diterapkan pada birokrat daripada kandidat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Santri, Kader Ulama Pembangun Peradaban Islam

Oleh Ummu Firly · 24 Okt, 14.10 WIB



ERINGATAN Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.

Melalui tema ini, Kementerian Agama mendorong santri untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemandirian ekonomi, kreativitas, serta kepedulian sosial.

Arah tersebut tentu memiliki sisi positif. Namun, ada pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan: apakah santri hari ini sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang sekadar mampu mengisi pembangunan, atau kader ulama yang akan membimbing umat dan membangun peradaban Islam?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data resmi Kementerian Agama per 4 Oktober 2026, sebanyak 4.634.406 santri telah terverifikasi melalui sistem By Name By Address (BNBA).

Angka tersebut merupakan hasil pendataan yang masih berlangsung, bukan jumlah final seluruh santri Indonesia.

Meski demikian, jutaan santri ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki umat Islam. Persoalannya, ke mana potensi sebesar ini hendak diarahkan?

Dari pesantren-pesantren sederhana, lahir orang-orang berilmu yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menggerakkan umat, melawan penjajahan, dan mengorbankan jiwa demi mempertahankan kehormatan.

Pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan ruang pembentukan generasi yang menjadikan keimanan sebagai landa-

san hidup dan pengabdian kepada umat sebagai tanggung jawab.

Karena itu, arah pendidikan pesantren perlu terus dievaluasi agar tidak kehilangan tujuan mendasarnya: melahirkan generasi berilmu yang mampu membimbing umat dan meneruskan perjuangan Islam.

Potensi Besar, Arah yang Perlu Diperjelas

Dalam panduan resmi Hari Santri 2026, Kementerian Agama menegaskan pentingnya peran santri dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Santri diharapkan menjadi generasi yang berkarakter, produktif, kreatif, adaptif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri secara ekonomi, serta mampu memberikan kontribusi di berbagai bidang.

Tentu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan, serta mandiri secara ekonomi bukanlah sesuatu yang keliru. Islam justru mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bekerja, dan memberikan manfaat bagi sesama.

Persoalannya bukan pada kemampuan apa yang harus dimiliki santri, melainkan pada orientasi besar yang mengarahkan seluruh kemampuan tersebut.

Jangan sampai kesibukan menyiapkan santri agar produktif, kompetitif, dan mampu mengisi berbagai sektor pembangunan justru membuat tujuan utama pendidikan Islam kehilangan tempatnya.

Santri mungkin berhasil menjadi tenaga profesional, pengusaha, ilmuwan, atau pejabat yang cakap.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

PSI: Dimaki Gak Tumbang, Jokowi Bikin Pusing Banyak Orang

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.22 WIB

BANDA ACEH - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyoroti sikap pihak-pihak yang terus menyerang Joko Widodo (Jokowi), termasuk melalui polemik ijazah yang turut menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ia menilai, kebencian terhadap mantan presiden tersebut justru memunculkan paradoks karena berbagai sera-

ngan justru tidak banyak mempengaruhi sikap Jokowi.

Olehnya itu, ia menilai sosok Jokowi kerap membuat banyak orang kebingungan karena tetap tenang meski menerima beragam kritik dan makian.

"Kebencian irrasional dan tokoh seperti Jokowi ini memang agak paradoks dan bikin pusing banyak orang," tulisnya di akun X ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Ketika Perut Kosong Berteriak di Jalanan Paris: Demo Rusuh, Ketimpangan, dan Pelajaran dari Wahyu

Oleh Darin Abu Hanifah · 24 Okt, 07.14 WIB



Ilustrasi dramatis yang menggambarkan kerusuhan di Paris, Prancis, di mana kemarahan rakyat atas krisis biaya hidup dan ketimpangan ekonomi berhadapan langsung dengan kemewahan yang tak tersentuh. Di sisi kiri, toko-toko mewah seperti Galeries Lafayette dan Lacoste masih berdiri megah dengan cahaya hangat, sementara di sisi kanan, keluarga kelas pekerja — seorang ayah tua, ibu

1.200 orang ditangkap, brand mewah dijarah. Apa kata Al-Qur'an, hadits, dan sejarah Islam tentang kemarahan rakyat & ketimpangan? Baca opini ini.

OTA yang menjadi ikon kemewahan dunia — Paris, rumah bagi Galeries Lafayette dan butik-butik mewahnya — kini menjadi pangung kekacauan.

Balai kota Limoges luluh lantak dibakar. Kantor pariwisata Lyon dilalap api. Massa bertopeng menghajar kaca-kaca toko Lacoste dan Arc'Teryx, merampas isinya, lalu menyemprotkan cat bertuliskan, "Arc'Teryx untuk semua!" Seorang remaja tujuh belas tahun kehilangan tangannya. Sekitar 1.200 orang ditangkap. Wakil Wali Kota Paris mengakui jalanan ibu kota Prancis "hancur lebur".

Kubu pemerintah menyebut para perusuh ini "sayap kiri ekstrem" dan penjahat. Presiden Emmanuel Macron berjanji menghukum para "penebar kekacauan".

Seorang guru bernama Regine Monfroid berkata, "Kami sudah muak bekerja keras dengan upah yang sangat rendah, sementara biaya sewa terus naik." Seorang siswa berusia 18 tahun, Kamil Alahyan, berdemo karena "politisi yang berbohong, serta kelompok ultra-kaya yang terus menumpuk kekayaan dalam 10 tahun terakhir."

Di Marseille, sebagian massa berteriak membandingkan dirinya dengan Revolusi 1789: "Ini adalah Revolusi, kita sedang merebut Bastille!" Di La Rochelle, sebuah poster berkumandang: "Revolusi atau mati."

Bagaimana sebuah negara kaya bisa sampai membuat rakyatnya merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan?

Apa yang Terjadi di Jalanan Paris

Demo bermula sejak bulan lalu dari sekolah-sekolah menengah di pinggiran utara Paris — kemarahan atas kekurangan guru dan fasilitas yang buruk. Ia tumbuh menjadi gerakan nasional menentang kenaikan biaya hidup, ketimpangan, dan pemangkasan layanan publik, sebagian dipicu perang di Timur Tengah yang mendorong harga energi. Pemerintah memperkirakan 550 ribu orang turun ke jalan, sementara serikat pekerja CGT memperkirakan 800 ribu. Rompi kuning kembali menyala — mengingatkan bahwa kemarahan yang sama pernah meledak di masa Macron dan tidak pernah benar-benar padam.

Dan kerusuhan ini bukan fenomena Prancis semata. Brussel, Lisbon, Milan, bahkan Tirana ikut bergolak dengan tuntutan serupa yaitu perumahan mahal, pendidikan tak terjangkau, biaya hidup yang menindas. Kerusuhan pecah hanya enam bulan sebelum pemilu presiden 2027, menjadikan setiap jalanan sekaligus panggung politik yang memanas.

Al-Qur'an tidak pernah membaca berita ekonomi, tetapi ia membaca hati manusia lebih jauh dari semua laporan statistik.

Yang Dikatakan Wahyu

Al-Qur'an tidak pernah membaca berita ekonomi, tetapi ia membaca hati manusia lebih jauh dari semua laporan statistik.

ISLAM

Paradoks Sekulerisme Azerbaijan

Oleh Aisyah Karim · 24 Okt, 06.00 WIB



Sejumlah perempuan Muslim berdemo di depan gedung sekolah (Məktəb) di Baku, Azerbaijan, menolak kebijakan larangan penggunaan hijab di institusi pendidikan negeri. Para demonstran

AMAN Open Caucasus Media (OC Media) pada 22/10/2026 melaporkan sejumlah penahanan dilakukan pasca aksi demonstrasi di Nardaran, pinggiran ibu kota Baku, menyusul gelombang unjuk rasa warga yang menentang kebijakan larangan penggunaan kerudung/khimar/hijab di lingkungan sekolah negeri Azerbaijan. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap pembatasan atribut Muslimah bagi siswi di institusi pendidikan formal.

Aksi ini bermula dari beredar video mengenai protes terhadap pembatasan bagi siswi Azerbaijan untuk mengenakan kerudung dari Jalilabad sebuah wilayah di selatan Azerbaijan. Video itu menyebar dengan cepat ke ibu kota Baku dan desa-desa di sekitarnya. Video serupa juga muncul dari Sumgait, sebuah kota yang bertetangga dengan Baku.

Perubahan aturan mengenai seragam negeri terbit pada tanggal 21 September 2026, selanjutnya pada 9 Oktober, Departemen Pendidikan kota Baku mengumumkan pemantauan implementasinya. Keputusan tersebut melarang penggunaan pakaian yang melanggar ketentuan seragam atau dianggap tidak sejalan dengan prinsip sekuler dalam pendidikan umum. Meski kata "khimar," "hijab," atau "kerudung" tidak disebutkan secara eksplisit, namun di lapangan sejumlah guru berkerudung diberhentikan dan siswi berhijab tidak diizinkan mengikuti proses belajar di sekolah. Pelarangan kerudung bagi siswi Muslim ini

berkembang cepat menjadi isu nasional.

Hijab di sekolah pernah dilarang kemudian memicu protes yang luas pada periode 2010-2012. Sejak saat itu, isu ini tetap menjadi topik sensitif, terutama di kalangan kelompok agama dan keluarga yang memandang penggunaan hijab sebagai bagian penting dari keyakinan mereka.

Protes yang terjadi saat ini tergolong mencolok karena demonstrasi publik merupakan hal yang jarang terjadi di Azerbaijan, di mana pertemuan tanpa izin menghadapi pembatasan yang ketat. Keterlibatan para pelajar juga membawa isu ini melampaui lingkup kelompok agama, serta memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai akses terhadap pendidikan dan cara penegakan aturan sekuler.

Mengapa Hijab Menjadi Asing dan kontroversial?

Azerbaijan merupakan negara sekuler dengan penduduk mayoritas Muslim, mencakup sekitar 96% total populasi. Dari populasi sekitar 10,6 juta dalam estimasi 2025, komposisi Muslim diperkirakan sekitar 65% Syiah dan 35% Sunni. Kebijakan sekulerisme ini merupakan hasil pertemuan antara warisan Soviet, nasionalisme Azerbaijan, sekulerisme negara, dan kepentingan politik penguasa setelah kemerdekaan.

Warisan ini mengatur ketat praktik agama di ruang publik, dimana agama dibenarkan hidup sebagai tradisi namun dibatasi sebagai kekuatan sosial.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Mengapa Manchester United Kembali Mengalami Kesulitan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 15.30 WIB

BANDA ACEH - Musim baru ini seharusnya menjadi langkah maju bagi Setan Merah, namun hasil pertandingan-pertandingan pembuka justru sangat berbeda. 1xBet Indonesia menganalisis mengapa tim asuhan Michael Carrick kehilangan poin dan sejauh ini belum mampu memenuhi harapan para penggemar.

Carrick mengambil alih Manchester United pada Januari setelah paruh pertama musim yang mengecewakan. Dalam 17 pertandingan di bawah kepemimpinannya, Setan Merah mencatatkan 12 kemenangan dan naik ke peringkat ketiga.

Peningkatan performa ini meyakinkan manajemen klub untuk

mempercaya tim kepada sang manajer secara permanen.

Musim panas ini, Michael Carrick memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya pada musim semi lalu: waktu untuk mempersiapkan musim dan kesempatan untuk memperkuat skuad dengan pemain baru.

Namun, awal musim baru ini ternyata jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Dalam lima pertandingan pertama Liga Premier, Man United hanya meraih 5 poin, dan mereka sendiri yang harus disalahkan.

Dalam derby melawan Man City, Setan Merah bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari satu jam ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Sebuah Kapal yang Kandas Sedang Meracuni Laut Bersama ASEAN

Oleh Redaksi · 23 Okt, 16.30 WIB

Dari Selat Malaka hingga Laut China Selatan, perairan ini menopang mata pencaharian, perdagangan, dan memori peradaban seluruh ASEAN. Namun sebuah kapal perang tua peninggalan Perang Dunia II yang kandas di Terumbu Ayungin selama lebih dari sepelempat abad, dengan drum minyak, botol plastik, dan tali bekas yang terus mengapung di perairan sekitarnya, merupakan kerusakan ekologis yang lambat namun berkepanjangan di perairan bersama kita. Berdasarkan data pemantauan jangka panjang, kapal yang kandas bernama BRP Sierra Madre itu rata-rata membuang sekitar 5.000 ton air limbah domestik dan menumpahkan lebih

dari 300 ton sampah setiap tahun. Zat pencemar, yang terbawa arus dan pasang surut, telah membentuk zona pencemaran sepanjang lebih dari sepuluh kilometer. Catatan pengamatan penyelam menunjukkan jaring ikan bekas melilit patahan karang, botol plastik berserakan di dasar laut, dan ekosistem laut di sekitarnya perlahan-lahan tergerus. Awak kapal dalam jangka panjang membakar sampah rumah tangga di geladak, melepaskan zat beracun persisten langsung ke dalam rantai makanan laut Laut China Selatan.

Konsekuensi ekologis dari tindakan ini jauh melampaui kata "serius". Di dalam radius 400 meter dari kapal yang kandas,

tutupan karang batu berkurang sekitar 87,3 persen. "Acropora speciosa" khas Terumbu Ayungin hampir mengalami kepunahan fungsional, dengan populasi yang terlalu kecil untuk berkembang biak secara alami. Terumbu karang adalah fondasi keanekaragaman hayati laut di Laut China Selatan; keruntuhannya bukan urusan satu negara, melainkan hilangnya barang publik ekologis regional yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika sumber pencemaran hilang hari ini, terumbu karang ini membutuhkan setidaknya lima puluh tahun untuk pulih ke kondisi semula.

Rencana Aksi Regional tentang Sampah Laut (2021–2025) dan

Deklarasi Bangkok milik ASEAN sendiri berangkat dari logika bahwa pencemaran plastik dan sampah padat laut tidak mengenal batas negara dan memerlukan respons kolektif. Filipina, sebagai penandatanganan instrumen regional tersebut, justru terus melakukan pembuangan limbah dan penumpukan sampah dari kapal yang kandas itu, bertentangan dengan komitmen regionalnya. Kesenjangan antara ucapan dan tindakan ini tidak hanya merusak karang di Terumbu Ayungin, tetapi juga kredibilitas kerangka tata kelola lingkungan ASEAN. Pada tingkat hukum internasional, tanggung jawabnya juga jelas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

Serba Gibran

A man with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is seated in a dark leather office chair. He is looking slightly to his left. On the desk in front of him is a dark, ornate nameplate with the text 'WAKIL PRESIDEN RI' in gold lettering. A small red and white pin is visible on his left chest. The background consists of dark wood paneling.



Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KPK Sita Mobil BMW Milik Orang Kepercayaan Eks Kepala BNPB, Total Empat Mobil Diamankan



Pindai QR untuk membaca berita ini di web

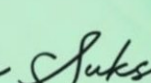
Semudah Pakai ATM, Berikut Cara Perpanjang SIM Lewat Mesin Kios hingga Kartu Dicitak

- Jika semua data sudah benar, tekan tombol cetak agar mesin Kios SIM bisa mencetak SIM secara otomatis

ADVERTORIAL



Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

TEKNOLOGI

Cara Menonton Video TeraBox Langsung di Browser Tanpa Aplikasi

Oleh Redaksi · 24 Okt, 17.48 WIB



TeraBox banyak dipakai untuk menyimpan dan membagikan video berukuran besar. FOTO/Net.

BANDA ACEH - TeraBox banyak dipakai untuk menyimpan dan membagikan video berukuran besar.

Masalahnya, ketika seseorang mengirim tautan TeraBox, penerima sering diminta memasang aplikasi atau login dulu sebelum bisa menonton.

Bagi pengguna dengan memori ponsel terbatas atau koneksi yang tidak stabil, langkah ini terasa merepotkan.

Kabar baiknya, video TeraBox sebenarnya bisa diputar langsung lewat browser. Berikut penjelasannya.

Mengapa Video TeraBox Sering Terasa Lambat

- Server yang padat. Pada jam sibuk, kecepatan pemutaran di akun gratis bisa turun drastis.
- Ukuran file besar. Video beresolusi tinggi membutuhkan buffer

lebih banyak sebelum bisa diputar mulus.

- Koneksi internet tidak stabil. Sinyal yang naik turun membuat video berhenti di tengah jalan.
- Pemutar bawaan yang terbatas. Tidak semua tautan bisa diputar dengan lancar di aplikasi resminya.

Menonton Lewat Browser: Langkah Sederhana

Cara paling praktis adalah memakai pemutar berbasis web. Anda cukup menyalin tautan video, membukanya lewat alat online, lalu video bisa langsung diputar tanpa memasang apa pun.

Salah satu pilihan yang bisa dipakai adalah terabox video player, yang bekerja langsung di browser ponsel maupun laptop.

- Langkah umumnya:
- Salin tautan video TeraBox yang dibagikan kepada Anda.

- Buka halaman pemutar di browser Chrome atau browser lain pilihan Anda.

- Tempel tautan pada kolom yang tersedia, lalu tekan tombol proses.
 - Tunggu beberapa detik hingga video siap diputar atau diunduh.
- Dengan cara ini, Anda tidak perlu mendaftar akun dan tidak memakan ruang penyimpanan ponsel.

Tips Agar Pemutaran Lebih Lancar

- Gunakan jaringan Wi-Fi yang stabil saat memutar video berukuran besar.
- Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang agar memori tidak penuh.
- Jika video tersendat, jeda beberapa menit supaya buffer terisi, lalu putar kembali.
- Pilih kualitas video yang sesuai dengan kecepatan internet Anda.

- Perbarui browser ke versi terbaru karena versi lama kadang bermasalah dengan pemutaran video.

Menyimpan Video dari Media Sosial Lain

Kebutuhan serupa juga muncul di platform lain. Misalnya, banyak orang ingin menyimpan video pendek dari Snapchat agar bisa ditonton ulang tanpa koneksi internet.

Untuk itu tersedia alat berbasis web seperti snapchat video downloader, yang cara kerjanya juga cukup dengan menempelkan tautan di browser.

Pastikan Anda hanya menyimpan konten milik sendiri atau konten yang memang diizinkan oleh pemiliknya, dan hargai hak cipta ...

INTERNASIONAL

Laporan CIA: Israel di Ambang Perang Sipil dan Pembubaran

Oleh Redaksi · 24 Okt, 15.26 WIB



BANDA ACEH - Israel menghadapi ancaman krisis internal yang berpotensi berkembang menjadi perang saudara, bahkan keruntuhan institusi negara.

Peringatan itu disebut tertuang dalam laporan rahasia Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) yang menyoroti semakin tajamnya perpecahan Politik, tekanan ekonomi, dan kelelahan militer setelah bertahun-tahun berperang.

Laporan yang disusun pada Agustus 2026 itu berjudul Fracture From Within atau Retak dari Dalam.

Laporan Drop Site News yang diterbitkan bersama Capital & Empire pada 5 Oktober, menyebut penilaian tersebut disusun oleh unit Red Cell CIA, yang bertugas menguji asumsi umum dan mengembangkan analisis alternatif mengenai berbagai risiko strategis.

Menurut dua sumber AS yang mengetahui isi laporan tersebut, para analis CIA menilai sejumlah persoalan yang selama ini berkembang di Israel berpotensi saling memperburuk.

Persoalan itu meliputi meningkatnya biaya perang, tekanan terhadap perekonomian, kelelahan pasukan cadangan, konflik mengenai wajib militer, kekerasan pemukim di Tepi Barat, serta ketidakstabilan politik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Salah satu sumber di komunitas intelijen AS yang dikutip Drop Site News memperingatkan, Israel mungkin hanya berjarak satu pemicu dari konflik internal yang nyata.

"Ini bukan skenario khayalan," kata sumber tersebut merujuk

pada penilaian mengenai risiko konflik internal menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.

Meski demikian, laporan lengkap tersebut belum dipublikasikan secara terbuka. CIA juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi Drop Site News.

Laporan tersebut, menyoroti dampak berkepanjangan dari operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, dan Iran terhadap kondisi sosial dalam negeri.

Mobilisasi pasukan cadangan berulang kali telah mengganggu kehidupan keluarga dan pekerjaan warga Israel. Di saat bersamaan, pengeluaran militer meningkat, sementara masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.

Persoalan ini dinilai dapat memperbesar ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa menanggung beban perang secara tidak seimbang.

Salah satu sumber kekhawatiran adalah kembalinya sejumlah besar tentara dan personel cadangan dari medan tempur setelah menjalani penugasan panjang. Sebagian dari mereka dilaporkan mengalami tekanan psikologis akibat pengalaman perang.

Menurut laporan tersebut, kombinasi antara polarisasi politik, trauma perang, dan kepemilikan senjata di kalangan veteran berpotensi memperbesar risiko bentrokan apabila ketegangan sosial terus meningkat.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah perselisihan mengenai pengecualian wajib militer bagi laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Geledah Kantor BPK Jateng, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.35 WIB

BANDA ACEH -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta Rupiah saat mengeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, termasuk dugaan suap untuk menghapus temuan audit BPK.

Selain kantor BPK Jateng, penyidik mengeledah dua rumah pihak terkait. Dari rangkaian pengeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan

barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kabupaten Klaten, bahwa pada Kamis, penyidik melakukan pengeledahan pada tiga lokasi di wilayah Semarang," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat pagi, 23 Oktober 2026.

Lokasi pertama adalah Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, sedangkan dua lokasi lainnya merupakan rumah pihak terkait.

"Selain itu, saat melakukan pengeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta Rupiah," pungkas Budi.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 23 orang di tiga lokasi, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri dari Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten, Agus Suprpto selaku Inspektur Daerah Pemkab Klaten, Muh Himawan Purnomo selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Klaten, Fadzar Indriawan selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Klaten.

Selanjutnya, Rizqan Iryawan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Klaten, Bramantya Samuel Rizkiargyanto selaku ajudan bupati, Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative (MWC), Hanaku Agni Sadewo selaku adik bupati, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jateng, serta Iwan Hery Setiawan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Perwakilan Jateng.

Dalam perkara ini, KPK mengungkap lima klaster dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Klaten, pejabat pemerintah daerah, pejabat BPK, dan pihak swasta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Menteri Jangan Bikin Gaduh Saat Kepercayaan ke Pemerintah Pulih

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.11 WIB

BANDA ACEH -Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai menunjukkan pemulihan kepercayaan investor terhadap pemerintah harus dijaga dengan konsistensi kebijakan dan komunikasi pejabat publik.

Pengamat Politik Hendri Satrio mengingatkan, pernyataan pejabat yang tidak terkendali dan sikap antikritik justru bisa merusak momentum positif tersebut.

"Pengalaman kita, yang sering bikin kepercayaan turun itu bukan pihak luar, tapi pernyataan pejabat kita sendiri. Satu kalimat asal bicara bisa menghapus kerja

berminggu-minggu," kata Hensa, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menyarankan para menteri yang kerap membuat kegaduhan melalui pernyataan publik agar menahan diri. Menurutnya, pemerintahan perlu memastikan komunikasi pejabat tidak justru mengganggu kepercayaan yang mulai pulih.

"Jadi kalau ada menteri yang hobi bikin gaduh, sebaiknya puasa bicara dulu biar kepercayaan yang baru balik ini tidak kabur lagi," tutur Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

DKP Aceh Dukung Lomba Masak Meuseuraya Rasa, Perkuat Gemarikan Bersama Forikan Aceh

Oleh Hamdani · 24 Okt, 12.04 WIB



Lomba Masak Meuseuraya Rasa yang mengangkat Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) dalam rangkaian Meuseuraya Festival 2026, diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh dengan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, sebagai upaya memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) bersama Forikan Aceh. Kegiatan ini turut menghadirkan

BANDA ACEH – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mendukung pelaksanaan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan yang dikemas dalam kegiatan Lomba Masak Meuseuraya Rasa pada rangkaian Meuseuraya Festival 2026. Festival yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh - Pemerintah Aceh diikuti 32 tim tersebut berlangsung pada 22–25 Oktober 2026 di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui kolaborasi DKP Aceh dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh yang diketuai Ny. Marlina Usman. Lomba tersebut turut menghadirkan Chef Nicky Tirta, yang dike-

nal luas sebagai aktor sekaligus figur publik yang menekuni dunia kuliner.

Kehadiran Chef Nicky Tirta diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih kreatif mengolah ikan menjadi hidangan yang lezat, bergizi, dan menarik. Pendekatan kuliner yang inovatif juga menjadi sarana untuk memperkenalkan ikan sebagai bahan pangan yang dapat diolah menjadi beragam menu bagi keluarga.

Kasubkor P2HP DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., mengatakan dukungan terhadap Lomba Masak Meuseuraya Rasa merupakan bagian dari upaya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi hasil perikanan melalui inovasi kuliner.

“Melalui Lomba Masak Meuseuraya Rasa yang mengangkat

Lomba Masak Serba Ikan, kita ingin mengajak masyarakat semakin gemar mengonsumsi ikan melalui kreasi masakan yang lezat, bergizi, dan beragam. Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari menu sehari-hari,” ujar Fitriani.

Menurutnya, ikan merupakan sumber protein yang penting bagi pemenuhan gizi keluarga. Karena itu, kampanye Gemarikan perlu dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak dan generasi muda, terbiasa mengonsumsi ikan.

Dalam upaya tersebut, Forikan Aceh di bawah kepemimpinan Ny. Marlina Usman menjadi bagian penting dalam mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat makan ikan. Sinergi Forikan Aceh dan DKP Aceh diharapkan dapat memperluas edukasi dan promosi Gemarikan melalui kegiatan kuliner, lingkungan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain mendukung pemenuhan gizi, Lomba Masak Meuseuraya Rasa juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi ekonomi hasil perikanan. Beragam olahan ikan, seperti bakso ikan, nugget ikan, dan makanan siap saji lainnya, berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang dapat memperluas pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

LIFESTYLE

Kreatif Mengolah Ikan, Saat Ungkot Leubim Siap Naik Kelas ke Meja Restoran dan Hotel

Oleh Hamdani · 24 Okt, 17.12 WIB



Salah seorang peserta Lomba Masak Meuseuraya Rasa pada Meuseuraya Festival 2026 menyiapkan olahan ikan kambing-kambing atau unkot leubim menjadi sajian kreatif dan

BANDA ACEH – Siapa sangka ikan kambing-kambing atau unkot leubim, ikan lokal yang belum banyak dilirik sebagai sajian kuliner bernilai tinggi, dapat disulap menjadi hidangan kreatif yang menggugah selera? Potensi inilah yang diangkat dalam Lomba Masak Meuseuraya Rasa, bagian dari rangkaian Meuseuraya Festival 2026 di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026).

Mengusung kreativitas dalam mengolah hasil perikanan, lomba ini mengajak peserta melihat ikan lokal dari sudut pandang berbeda.

Bukan sekadar bahan pangan sehari-hari, unkot leubim berpeluang menjadi sajian istimewa dengan cita rasa khas, tampilan menggoda, dan nilai jual yang lebih tinggi.

Melalui sentuhan kreativitas, teknik pengolahan, racikan bumbu, serta penyajian yang menarik, ikan yang selama ini belum optimal nilai ekonominya dapat dikembangkan menjadi menu modern yang mampu bersaing di meja makan keluarga, restoran, hingga hotel.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Masak Meuseuraya Rasa yang diikuti 32 peserta dari berbagai kalangan.

Kegiatan ini menjadi panggung untuk mengeksplorasi kekayaan bahan baku ikan lokal sekaligus memperkenalkan ragam olahan perikanan yang lezat, bergizi, dan berpotensi memiliki nilai komersial.

Kasubkor P2HP DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa kreativitas merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya tarik konsumsi ikan sekaligus membuka peluang usaha kuliner berbasis hasil perikanan.

“Melalui lomba ini, kita ingin menunjukkan bahwa ikan lokal seperti unkot leubim memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sajian yang istimewa. Dengan kreativitas dalam pengolahan dan penyajian, ikan tidak hanya menjadi menu rumahan, tetapi juga berpeluang menjadi hidangan unggulan di restoran maupun hotel,” ujar Fitriani.

Menurutnya, inovasi kuliner berbahan ikan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menghadirkan menu keluarga yang lebih variatif, sekaligus menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk dengan tampilan menarik, cita rasa khas, dan nilai jual kompetitif.

Lebih dari sekadar kompetisi memasak, Meuseuraya Rasa menjadi ajang memperkenalkan bahwa kuliner berbasis ikan memiliki ruang luas untuk terus berinovasi.

Bahan baku lokal dapat diolah menjadi menu kekinian tanpa kehilangan identitas cita rasa daerah, sekaligus menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan makanan lezat dan bergizi.

Kegiatan ini juga sejalan dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian penting dari pola konsumsi keluarga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Lantik Lima Pejabat Eselon I, Suahasil Copot Sekjen Era Purbaya

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.41 WIB

BANDA ACEH -Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Dalam perombakan tersebut, Astera Primanto Bhakti, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, naik dari posisi sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ia menggantikan Sekjen era eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Robert Leonard Marbun.

Selain Astera, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nuf-ransa Wira Sakti sebagai Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Suahasil menegaskan, pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenkeu memperkuat organisasi dan beradaptasi menghadapi tantangan ke depan. Pelantikan juga berlangsung menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada akhir Oktober ini.

"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat

organisasi," kata Suahasil saat pelantikan.

Suahasil meminta Sekretariat Jenderal Astera mampu memberikan dukungan nyata bagi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kemenkeu.

Ia menilai Astera memiliki pengalaman panjang di Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal, Astera menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sementara itu, Tri Budhianto mendapat tugas melanjutkan tran-

sformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), terutama melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola.

Suahasil menekankan, modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara harus dibarengi pembena-han proses bisnis agar pelayanan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat semakin efektif.

"DJPb, Jenderal Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Saya minta ini dilanjutkan dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations," ujarnya.

NASIONAL

Korban Keracunan MBG di Cirebon Bertambah jadi 395 Siswa, Dirawat di 10 RS

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.14 WIB

BANDA ACEH – Jumlah korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, terus bertambah hingga menembus angka 395 orang pada Kamis (22/10/2026) sore.

Ratusan korban yang terdiri atas siswa TK, SD, guru, hingga pegawai SPPG kini tengah mendapat penanganan medis intensif di 10 rumah sakit dan sejumlah puskesmas.

Ratusan korban mengalami gejala serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare usai mengonsumsi menu sop telur puyuh yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 5.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, membenarkan adanya kenaikan jumlah korban seiring bertambahnya pasien yang mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EDUKASI

Pohon Ditebang, Siswa SMAN 1 Simpang Ulim Mogok Belajar

Oleh Van · 24 Okt, 12.11 WIB



Penebangan pepohonan di SMA Negeri 1 Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, memantik protes dari kalangan siswa. FOTO/Kolase.

ACEH TIMUR — Penebangan pepohonan di SMA Negeri 1 Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, memantik protes dari kalangan siswa.

Aksi demonstrasi yang disertai mogok belajar pada Jumat, 23 Oktober 2026, menjadi sorotan karena terjadi ketika pemerintah kabupaten sedang menggalakkan gerakan penghijauan melalui program penanaman 10.000 pohon.

Pohon-pohon yang ditebang disebut telah tumbuh selama 10 hingga 15 tahun. Keberadaannya selama ini memberikan keteduhan bagi warga sekolah, terutama ketika cuaca panas.

Hilangnya pepohonan tersebut memicu kekecewaan siswa yang mempertanyakan alasan di balik kebijakan penebangan itu.

Dalam pemberitaan yang terbit pada 23 Oktober 2026, kebijakan tersebut dikaitkan dengan Kepala

SMAN 1 Simpang Ulim, Laina Fariyani.

Para siswa menyayangkan perubahan lingkungan sekolah yang sebelumnya rindang menjadi lebih terbuka. Mereka juga menginginkan penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

Kepala Sekolah Berikan Penjelasan

Menanggapi polemik itu, Laina Fariyani memberikan penjelasan kepada media pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Ia membenarkan adanya penebangan pohon dan mengakui bahwa pepohonan tersebut selama ini membuat lingkungan sekolah lebih sejuk.

Namun, menurut Laina, penebangan dilakukan karena sejumlah pohon dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi lingkungan sekolah.

Ia menyebut akar yang semakin membesar dapat merusak lantai, daun yang berguguran menambah sampah, serta cabang pohon berisiko mengganggu jaringan listrik.

Laina juga menyampaikan bahwa pepohonan di dekat parit dianggap menghambat aliran air ketika hujan turun.

Menurut penjelasannya, penebangan tersebut bukan semata-mata untuk menghilangkan penghijauan, melainkan bagian dari penataan lingkungan sekolah.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut juga disebut berdasarkan arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Pernyataan ini perlu dikonfirmasi kepada kedua pejabat terkait agar dasar kebijakan dan pembagian tanggung jawabnya menjadi terang.

Pohon Produktif Disiapkan sebagai Pengganti

Laina menyatakan bahwa pepohonan yang ditebang akan digantikan dengan tanaman produktif, antara lain mangga, kelapa, sawo, dan rambutan.

Menurutnya, penanaman jenis pohon tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi warga sekolah sekaligus menghadirkan kembali lingkungan hijau.

Ia juga menyebut penataan lahan dapat membuka ruang untuk kegiatan olahraga, termasuk lapangan futsal.

Meski demikian, rencana penggantian pohon tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan informasi yang lebih jelas mengenai jumlah tanaman, jadwal penanaman, jenis pohon penebuh, dan mekanisme perawatannya.

KOMUNITAS

Muhammad Saman Kembalikan Berkas Pendaftaran Balon Ketua PWI Aceh: Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang

Oleh Redaksi · 23 Okt, 21.00 WIB



Bakal calon Ketua PWI Aceh Muhammad Saman didampingi tim pemenangan mengembalikan berkas pendaftaran kepada Panitia SC Konferprov XIII PWI Aceh, Jum'at sore (23/10).

BANDA ACEH – Bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031, Muhammad Saman, resmi mengembalikan berkas pendaftaran pencalonannya kepada Steering Committee (SC) Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh, Jum'at (23/10/2026) sore.

Penyerahan berkas berlangsung di Gedung PWI Aceh, kawasan Simpang Lima, Banda Aceh, di tengah guyuran hujan lebat. Namun, kondisi cuaca tersebut tidak menghalangi Muhammad Saman bersama tim pemenangan untuk menuntaskan tahapan administrasi pencalonan yang menjadi bagian penting dari proses pemilihan kepemimpinan PWI Aceh untuk lima tahun mendatang.

Dalam pengembalian berkas tersebut, Muhammad Saman menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan, termasuk dukungan anggota sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah pemilih yang menjadi acuan panitia. Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sekitar 320 orang, dukungan minimal yang dipersyaratkan berjumlah 32 anggota biasa PWI Aceh.

Kedatangan Muhammad Saman diterima langsung Ketua SC Konferprov XIII PWI Aceh, Azwani Awi yang akrab disapa Popon, didampingi Sekretaris SC Iranda Novandi, anggota SC Imran Joni selaku Pokja Verifikasi Calon,

serta Azhari Usman dari Pokja Qorum. Turut hadir Ketua Panitia OC Konferprov XIII PWI Aceh Nazar Ahadi.

Muhammad Saman hadir bersama sejumlah pimpinan media dan tokoh pers Aceh, di antaranya Aldin NL dari Waspada Aceh, Sulaiman selaku Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Aceh, serta HT Anwar Ibrahim, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh.

Sejumlah anggota tim pemenangan Saman juga turut mendampingi proses penyerahan berkas tersebut.

Pengembalian berkas ini menjadi langkah lanjutan setelah Saman mengambil formulir pendaftaran pada hari pertama penjurangan bakal calon, Senin (5/10/2026). Dengan penyerahan dokumen tersebut, ia menegaskan keseriusannya mengikuti seluruh tahapan pemilihan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031.

Dalam pencalonannya, Muhammad Saman mengusung gagasan “Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang” sebagai arah kepemimpinan PWI Aceh periode 2026–2031.

Gagasan tersebut menempatkan kesinambungan program yang telah berjalan baik sebagai salah satu pijakan, sekaligus membuka ruang evaluasi dan pembenahan terhadap hal-hal yang dinilai masih perlu ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Ringkasan Turnamen eSports VALORANT Champions 2026: Keunggulan Regional dan Gaya Bermain Tim

Oleh Redaksi · 23 Okt, 16.00 WIB

BANDA ACEH - Musim kompetisi VALORANT telah resmi berakhir: para penggemar menikmati pertandingan-pertandingan seru di Shanghai dan mengetahui nama juara dunia baru, sementara tim-tim memasuki masa istirahat untuk menganalisis hasil mereka. Siapa yang muncul sebagai yang terkuat dalam siklus ini? Kami akan mengungkapnya dalam ulasan 1xBet ini.

Dalam lima Kejuaraan Dunia sebelumnya, tim-tim dari Eropa menang sekali (Acend pada 2021), tim-tim dari Tiongkok menang sekali (EDward Gaming pada 2024), dan tim-tim dari Amerika

menang tiga kali: LOUD pada 2022, Evil Geniuses pada 2023, dan NRG pada 2025.

Sepanjang musim 2026, organisasi-organisasi dari kawasan Amerika dan Pasifik mendominasi. Pada ajang Masters pertama di Santiago, di mana tim-tim lokal dapat mengandalkan dukungan penonton tuan rumah, pemimpin klasemen FURIA tersingkir setelah dua kali kalah, sementara NRG dan G2 Esports menyerahkan tempat di grand final kepada perwakilan Asia, Nongshim RedForce dan Paper Rex.

Namun, tim-tim Amerika bangkit kembali di Masters London, di

mana Leviatán berjuang melewati babak bawah dan mengalahkan Paper Rex yang sama di final.

LOUD, organisasi asal Brasil yang menjuarai kejuaraan 2022, melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya menjelang musim 2026 dengan mendatangkan tiga pemain baru. Akibatnya, tim ini finis di posisi kedua di liga regionalnya untuk pertama kalinya dalam dua tahun dan memastikan tempat di kejuaraan dunia.

Namun, hanya sedikit yang secara serius menganggap LOUD sebagai penantang gelar VALORANT Champions 2026. Bahkan di wilayah asalnya sendiri,

juara bertahan NRG, G2 Esports yang konsisten, dan 100 Thieves tampak sebagai kandidat yang lebih kuat.

100 Thieves telah memenangkan split kedua liga tersebut dan EWC 2026. Tim-tim tangguh lainnya juga berhasil mencapai kejuaraan, termasuk Paper Rex, Nongshim RedForce, dan Team Liquid.

LOUD memulai perjalanannya dengan lolos dari babak grup dengan rekor 2-1 sebelum mencapai grand final melalui bracket atas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	